

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi pelanggaran yang terjadi dalam Perseroan. WBS menjadi salah satu sarana partisipasi pengawasan yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan pengelolaan Perseroan yang baik dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme yang dilaksanakan dengan mematuhi norma hukum, moral dan sosial yang berlaku.

Whistleblowing System (WBS) is a system that can be used as a medium for reporting witnesses to convey information regarding indications of violations that have occurred within the Company. WBS is a means of effective oversight participation in order to participate in realizing good management of the Company and free from collusion, corruption and nepotism which is carried out by complying with applicable legal, moral and social norms.

PRINSIP DASAR WBS

1. Objektivitas, bahwa kegiatan pelaporan pelanggaran karyawan dan pihak berkepentingan harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan;
2. Efektivitas dan Efisiensi, bahwa kegiatan pelaporan pelanggaran karyawan dan pihak berkepentingan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
3. Akuntabilitas, bahwa proses kegiatan pelaporan pelanggaran karyawan dan pihak berkepentingan dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada karyawan dan pihak berkepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku;
4. Transparan, bahwa hasil kegiatan pelaporan pelanggaran karyawan dan pihak berkepentingan diinformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BASIC PRINCIPLES OF WBS

1. Objectivity, that the activity of reporting violations of employees and interested parties must be based on facts or evidence that can be assessed based on certain established criteria;
2. Effectiveness and Efficiency, that the activity of reporting violations of employees and interested parties must be carried out in an appropriate manner, saving energy, time and costs;
3. Accountability, that the process of reporting employee and interested party violations and their follow-up actions must be accountable to the Company's employees and interested parties in accordance with the prevailing laws and regulations and procedures;
4. Transparent, that the results of employee and interested parties reporting violations are informed based on clear and transparent mechanisms and procedures, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

TUJUAN WBS

Implementasi WBS dirancang untuk mendorong tercapainya sasaran dan memberikan manfaat bagi Perseroan, yaitu:

1. Mengidentifikasi, mendeteksi dan menyelesaikan kemungkinan adanya tindak pidana korupsi dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perseroan;
2. Menyediakan saluran formal terutama bagi karyawan Perseroan dan Pihak Ketiga, yaitu masyarakat, rekanan, konsumen dan Pemangku Kepentingan lain di lingkungan Perseroan untuk menyampaikan masalah/pengaduan/keluhan.

RUANG LINGKUP WBS

1. Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji secara material dalam laporan keuangan;
2. Permasalahan yang menyangkut independensi audit;
3. Pelanggaran peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Perseroan;
4. Peraturan internal yang berpotensi kerugian bagi Perseroan;
5. Kecurangan dan/atau dugaan korupsi;
6. Perilaku Insan Perseroan yang tidak sesuai Kode Etik Perseroan.

PIHAK YANG DAPAT MELAPOR DAN DILAPORKAN DALAM WBS

Seluruh insan Perseroan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan hingga pemangku kepentingan lainnya dapat melaporkan adanya pelanggaran. Sedangkan pihak yang dapat dilaporkan sebagai pelaku pelanggaran adalah Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Perseroan.

WBS OBJECTIVES

WBS implementation is designed to encourage the achievement of targets and provide benefits for the Company, including:

1. Identify, detect and resolve possible acts of corruption and violations of applicable regulations which may result in losses for the Company;
2. Provide formal channels, especially for Company employees and Third Parties, namely the public, partners, consumers and other Stakeholders within the Company to submit problems/complaints/complaints.

WBS SCOPE

1. Issues in accounting and internal control over financial reporting that have the potential to result in material misstatements in the financial statements;
2. Issues related to audit independence;
3. Violation of regulations relating to the implementation of the Company's program;
4. Internal regulations that have the potential to harm the Company;
5. Fraud and/or allegations of corruption;
6. Behavior of Company personnel that is not in accordance with the Company's Code of Ethics.

PARTIES THAT CAN REPORT AND BE REPORTED IN THE WBS

All Company personnel, namely the Board of Commissioners, Directors, and Company employees and other stakeholders can report violations. Meanwhile, parties that can be reported as perpetrators of violations are the Board of Commissioners, Directors, and all employees of the Company.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Penerapan pengaduan oleh pengungkap fakta akan diterima oleh Direktur Utama.

PROSEDUR SISTEM PELAPORAN PENGADUAN

Perseroan memiliki prosedur baku pelaporan pengaduan yang mengatur pelanggaran Kode Etik Perseroan dan di dalamnya termasuk masalah integritas, antara lain seperti penerimaan suap, korupsi, pemberian dan penerimaan hadiah serta kegiatan lainnya yang patut diduga dapat merugikan dan mencemarkan nama baik Perseroan. Tata cara penyampaian laporan pelanggaran adalah sebagai berikut:

- Email: corsec@ibf.co.i
- Telepon: +6221-4401408; +6221-4408442
- Menyampaikan surat resmi:
PT Intan Baru Prana Tbk
up. Corporate Secretary
INTA Building, Ground Floor
Jl. Raya Cakung Cilincing Km.3,5
Jakarta 14130

KERAHASIAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Kerahasiaan dalam melaporkan pelanggaran merupakan kunci dari perlindungan bagi pelapor atau yang terlapor. Berikut merupakan prinsip kerahasiaan yang dilaksanakan pada sistem pelaporan pelanggaran Perseroan:

1. Dalam melakukan proses pemeriksaan atas setiap pelaporan pelanggaran, wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme;
2. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perseroan;

COMPLAINTS MANAGEMENT COMMITTEE

Application of complaints by whistleblowers will be received by the President Director.

WHISTLEBLOWING SYSTEM PROCEDURES

The Company has a standard whistleblowing procedure that regulates violations of the Company's Code of Conduct and includes integrity issues, such as accepting bribes, corruption, giving and receiving gifts and other activities that are reasonably suspected of being detrimental and defaming the Company's reputation. The procedure for submitting violation reports is as follows:

- Email: corsec@ibf.co.i
- Telepon: +6221-4401408; +6221-4408442
- Menyampaikan surat resmi:
PT Intan Baru Prana Tbk
up. Corporate Secretary
INTA Building, Ground Floor
Jl. Raya Cakung Cilincing Km.3,5
Jakarta 14130

CONFIDENTIALITY OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

Confidentiality in whistleblowing is the key to protection for whistleblowers or the offenders. Following are the principles of confidentiality implemented in the Company's violation reporting system:

1. In carrying out the examination process for each violation report, confidentiality, the presumption of innocence and professionalism must be prioritized;
2. The identity of the reporter is guaranteed confidentiality by the Company;

3. Data pelapor atau informasi lainnya dari semua pelapor akan dijaga kerahasiaan, kecuali yang bersangkutan menyetujui pengungkapan data atau informasi tersebut dalam rangka kepentingan pelaksanaan pemeriksaan;
4. Perseroan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman atau tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diajukan kepada pihak manapun;
5. Perlindungan ini juga berlaku bagi pekerja yang melaksanakan investigasi maupun pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan atau penyimpangan;
6. Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.

PERLINDUNGAN PELAPORAN PELANGGARAN

Karyawan pelapor harus dilindungi dari:

- Dihilangkannya atau ditunda hak-hak atau sanksi kepegawaian;
- Diskriminasi dan tekanan-tekanan dalam bentuk fisik atau psikis;
- Tindakan-tindakan lain sebagai respon (tindakan yang bersifat pembalasan) dari Manajemen dan pihak terlapor atas pelaporan dan pengaduan yang dilakukan.

Pelapor selain karyawan (masyarakat, rekanan, pelanggan dan Pemangku Kepentingan lainnya) harus dilindungi dari :

- Diskriminasi;
- Tekanan-tekanan dalam bentuk fisik atau psikis;
- Tindakan-tindakan lain sebagai respon (tindakan yang bersifat pembalasan) dari Manajemen atau pihak terlapor atas pelaporan dan pengaduan yang dilakukan.

3. Data pelapor atau informasi lainnya dari semua pelapor akan dijaga kerahasiaan, kecuali yang bersangkutan menyetujui pengungkapan data atau informasi tersebut dalam rangka kepentingan pelaksanaan pemeriksaan;
4. Perseroan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman atau tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diajukan kepada pihak manapun;
5. Perlindungan ini juga berlaku bagi pekerja yang melaksanakan investigasi maupun pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan atau penyimpangan;
6. Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.

WHISTLEBLOWING PROTECTION

Reporting employees must be protected from:

- Elimination or postponement of employment rights or sanctions;
- Discrimination and pressure in the form of physical or psychological;
- Other actions as a response (actions that are retaliatory in nature) from the Management and the reported party for the reports and complaints made.

Whistleblowers other than employees (public, partners, customers and other Stakeholders) must be protected from:

- Discrimination;
- Pressures in the form of physical or psychological;
- Other actions as a response (actions that are retaliatory in nature) from Management or the reported party for the reports and complaints made.

SANKSI BAGI PELANGGAR

Sanksi yang diberikan terhadap terlapor antara lain:

- Direksi Perseroan harus segera mengembalikan nama baik terlapor apabila hasil pemeriksaan terhadap pengaduan tidak mengandung kebenaran;
- Direksi Perseroan segera mengambil tindakan sesuai pengaduan dengan ketentuan yang berlaku, apabila hasil pemeriksaan terbukti mengandung kebenaran;
- Apabila tidak menyangkut kerugian Perseroan, yaitu penyimpangan administratif, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perseroan;
- Apabila menyangkut tindak pidana khusus yang merugikan Perseroan dan jumlahnya cukup signifikan, kasusnya diserahkan ke Kejaksaan. Namun apabila jumlahnya tidak material, cukup diselesaikan intern Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PELAPORAN PELANGGARAN DAN TINDAK LANJUT

Hingga 31 Desember 2022, tidak terdapat pelaporan pelanggaran yang diterima oleh Perseroan.

SANCTIONS FOR OFFENDERS

The sanctions given to the reported include:

- The Board of Directors of the Company must immediately restore the good name of the reported party if the results of the examination of the complaint do not contain the truth;
- The Board of Directors of the Company immediately takes action according to the complaint with the applicable provisions, if the results of the examination are proven to contain the truth;
- If it is not related to the Company's losses, namely administrative irregularities, then it is resolved in accordance with the provisions that apply in the Company;
- If it involves a specific criminal act that is detrimental to the Company and the amount is quite significant, the case is referred to the prosecutor's office. However, if the amount is immaterial, it is enough to settle it internally in accordance with the applicable regulations.

VIOLATION REPORTING AND FOLLOW UP

Until December 31, 2022, there were no reports of violations received by the Company.



6

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Social Responsibility



Perseroan senantiasa berupaya mengintegrasikan prinsip dan praktik keberlanjutan dalam tata kelola kegiatan operasional perusahaan. Aspek ekonomi, lingkungan dan sosial merupakan aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian Perseroan dalam menjalankan sistem tata kelola terbaik sebagai landasan mencapai visi dan misi perusahaan.

The Company always strives to the sustainability practice and principles in Company's governance and operational activities. Economic, environmental and social aspects are focusing on the Company's attention in implementing the best governance system as the basis for achieving the Company's vision and mission.

PEDOMAN PELAKSANAAN

Komitmen Perseroan untuk melaksanakan prinsip-prinsip keberlanjutan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku di Indonesia, yaitu antara lain:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
3. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
4. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
7. PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

OPERATING PROCEDURE

The Company's commitment to implementing the sustainability principles is basically carried out by referring to the regulations in force in Indonesia, which include among others:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety.
3. Law No. 23 of 1992 concerning Health.
4. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.
5. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.
6. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
7. PP No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.

8. POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, pengelolaan sumber daya manusia, kepedulian terhadap lingkungan, praktik operasional yang adil dan berintegritas.

STRATEGI KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN

Perusahaan berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif kegiatan usaha baik dari sisi sosial maupun lingkungan. Upaya yang dilakukan Perseroan adalah melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Perseroan telah berkontribusi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diantaranya:

Membangun Budaya Keberlanjutan

Pembentukan budaya keberlanjutan merupakan bagian dari strategi untuk mencapai kinerja keberlanjutan yang optimal. Budaya keberlanjutan di Perusahaan berpedoman pada standar etika dan perilaku yang telah ditetapkan Perusahaan. Selain itu, Perseroan juga mengintegrasikan praktik keberlanjutan melalui kebijakan dan standar operasional prosedur, sehingga setiap tindakan dan keputusan yang diambil berlandaskan pada nilai-nilai keberlanjutan.

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Hubungan dengan pemangku kepentingan merupakan salah satu faktor terpenting untuk mendukung keberlanjutan bisnis Perusahaan. Perseroan berupaya untuk terus

8. POJK No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies, management of human resources, concern for the environment, fair and integrity operational practices.

CORPORATE SUSTAINABILITY STRATEGY

The company is committed to reduce the negative impacts of business activities both from social and environmental perspective. The efforts made by the Company are to carry out several activities related to Corporate Social Responsibility (CSR).

Contribution to the Sustainable Development Goals

The Company has contributed to the Sustainable Development Goals, including:

Building a Sustainability Culture

Establishing a culture of sustainability is part of the strategy to achieve optimal sustainability performance. The culture of sustainability in the Company is guided by ethical and behavioral standards set by the Company. In addition, the Company also integrates sustainability practices through policies and standard operating procedures, so that every action and decision taken is based on sustainability values.

RELATIONSHIP WITH STAKEHOLDERS

Relationship with stakeholders are one of the most important factors to support the sustainability of the Company's business. The Company strives to continue to establish two-

menjalin komunikasi dua arah dan melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan beberapa keputusan guna memenuhi harapan pemangku kepentingan.

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEBERLANJUTAN

Seluruh pelaksanaan program CSR Perusahaan di bawah tanggung jawab Sekretaris Perusahaan dan diawasi langsung oleh Direktur Utama.

TANTANGAN DALAM PENERAPAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dimana Perseroan dapat menjalankan operasional bisnisnya sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada para pemangku kepentingan. Namun, pada kenyataannya Perseroan masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Salah satu tantangannya adalah keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan Perseroan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program keberlanjutan. Selain itu, Perseroan fokus pada pertumbuhan bisnis. Namun, hal ini sama sekali tidak mengesampingkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan keberlanjutan Perseroan.

DISTRIBUSI NILAI EKONOMI

Perseroan berkomitmen untuk mengelola kinerja ekonomi agar dapat berkontribusi secara berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi nasional melalui nilai ekonomi bagi para pemangku kepentingan.

way communication and involve stakeholders in making several decisions to meet stakeholders expectations.

RESPONSIBLE FOR THE SUSTAINABILITY PROGRAM

The Corporate Secretary is responsible to the entire implementation of the Company's CSR programs and is directly supervised by President Director.

CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SUSTAINABILITY

The Company is committed to run its business in accordance with sustainability principles. Where the Company can carry out its business operations while at the same time contribute to stakeholders. However, in reality the Company still faces various challenges in implementing sustainable business practices. One of the challenges is the limited human resources within the Company to plan and implement sustainability programs. In addition, the Company focuses on business growth. However, this does not completely rule out economic, social and environmental aspects. Going forward, the Company is committed to improving the quality of the Company's sustainability implementation.

DISTRIBUTION OF ECONOMIC VALUE

The Company is committed to managing economic performance so that it can contribute sustainably to national economic development through economic value for stakeholders.

Pada tahun 2022, nilai ekonomi yang dihasilkan sebesar Rp14,61 miliar yang berasal dari pendapatan Perseroan sedangkan nilai ekonomi yang dibagikan terkait gaji dan tunjangan kepada karyawan sebesar Rp5,65 miliar.

MANAJEMEN RANTAI PASOK

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan bekerjasama dengan pemasok. Perseroan membuka diri bagi semua pihak untuk menjadi mitra pemasok dengan syarat, seperti pengalaman calon mitra, layanan yang dibutuhkan, harga, dan kualitas produk yang ditawarkan. Perseroan sangat ketat dalam memilih rekanan/pemasok karena menyangkut kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Perseroan juga mempertimbangkan pemasok dari daerah sekitar, guna mendukung perputaran ekonomi pemasok lokal.

DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG

Dampak ekonomi yang telah diberikan oleh Perseroan adalah pemberian bantuan sosial kepada warga yang berada disekitar Perseroan dengan mendukung kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan warga, baik kegiatan sosial yang bersifat keagamaan, maupun kegiatan sosial lainnya yang bersifat umum.

In 2022, the economic value is amounting to Rp14.61 billion generated from the Company's revenue. Meanwhile, the economic value distributed in regards to the employees' salaries and benefits is amounting to Rp5.65 billion and tax payments of xxx

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

In carrying out its business activities, the Company cooperates with suppliers. The company opens opportunity for all parties to be supply partners with requirements such as experience of potential partners, services required, price and quality of products offered. The Company is very strict in choosing partners/suppliers because it involves the quality of the products or services offered. The company also considers suppliers from the surrounding area, in order to support the economic turnover of local suppliers.

INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

The economic impact by the Company is the absorption of labor in the surrounding area, this provides an economic turnover around the area. In addition, the Company also contributes Regional Original Revenue through taxes and other fees which are also a source of funds for regional development in the Company's operational areas.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Social Responsibility to the Environment



Perseroan berkomitmen dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, maka Perseroan senantiasa memastikan kegiatan usahanya berdampak baik bagi lingkungan. Upaya Perseroan diwujudkan melalui partisipasi dalam kelestarian lingkungan. Bagi perseroan program CSR memiliki arti lebih dari sekadar perwujudan tanggung jawab terhadap lingkungan perusahaan. Namun, melalui program CSR, Perseroan yakin bahwa tujuan pengembangan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan lingkungan yang lestari akan dapat tercapai.

The Company is committed to achieve sustainable development goals, so the Company always ensures that its business activities have a positive impact on the environment. The Company's efforts are realized through participation in environmental sustainability. For the Company, the CSR program means more than just the realization of responsibility for the company's environment. However, through CSR program, the Company believes that the objectives of sustainable stakeholder development and sustainable environment can be achieved.

KEGIATAN DAN INISIATIF PELAKSANAAN

Upaya Perseroan mengelola kualitas lingkungan hidup sejauh ini berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup sebagai berikut:

Penghematan Energi

Kebijakan pengelolaan energi dilakukan secara rutin guna mengevaluasi pemanfaatan energi dan mengidentifikasi peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi energi. Sejauh ini, pelaksanaan manajemen energi yang telah dilakukan Perseroan mencakup kegiatan pengukuran, pencatatan, monitoring dan tindak lanjut penghematan penggunaan energi secara berkala.

Emisi

Pada tahun 2022, emisi yang dicatat oleh Perseroan merupakan emisi tidak langsung yang diperoleh dari konsumsi energi listrik PLN, emisi yang dihasilkan oleh genset dan kendaraan operasional. Upaya Perseroan untuk mengurangi emisinya adalah dengan menggunakan bahan bakar rendah sulfur untuk kendaraan operasional.

Pengelolaan Air

Selain energi, air merupakan salah satu kebutuhan vital bagi Perseroan. Air digunakan untuk kebutuhan domestik kantor, seperti wudhu, air bilas di toilet, menyiram tanaman, dan sebagainya. Kebutuhan air sebagian besar dipasok oleh PDAM. Penggunaan air dalam laporan ini merujuk di Kantor Pusat.

Untuk meminimalkan penggunaan air yang berlebihan sehingga dapat mengurangi konsumsi air bersih, Penggunaan air Perseroan dimaksimalkan menggunakan PDAM sebagai sumber air utama dan membatasi penggunaan air tanah.

IMPLEMENTATION ACTIVITIES AND INITIATIVES

The Company's efforts to manage environmental quality have been thriving. This is proven by several activities that have been carried out during 2022 related to corporate responsibility for the environment as follows:

Energy Saving

Energy management policies are carried out regularly to evaluate energy utilization and identify opportunities for energy savings as well as recommendations for increasing energy efficiency. So far, the implementation of energy management that has been carried out by the Company includes periodic measurement, recording, monitoring and follow-up activities to save energy use.

Emission

In 2022, the emissions recorded by the Company are indirect emissions derived from PLN's electricity consumption, emissions produced by generators and operational vehicles. The Company's efforts to reduce its emissions are by using low sulfur fuel for operational vehicles.

Water Management

Apart from energy, water is one of the vital needs for the Company. Water is used for domestic office needs, such as ablution, rinsing water in the toilet, watering plants, and so on. Most of the water needs are supplied by PDAM. In this report, the water stewardship refers to use within the Head Office.

To minimize excessive water usage to reduce clean water consumption, the Company's water usage is maximized by using PDAM as the main source of water and limiting the use of ground water.

Biaya Konsumsi Listrik dan Air

Electricity and Water Consumption Costs

Deskripsi Description	Satuan Unit	2022	2021
Konsumsi listrik Electricity Consumption	Rupiah	133.815.660	137.445.311
Konsumsi Air Water Consumption	Rupiah	5.336.871	5.621.699

Paperless

Perseroan telah menerapkan inisiatif kebijakan paperless office yang bertujuan meminimalisir penggunaan kertas mengingat dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan hidup akibat penebangan pohon secara masif. Untuk mendukung kebijakan ini, Perseroan menghimbau seluruh karyawan agar selalu mengoptimalkan fasilitas yang sudah disiapkan Perusahaan dan mengembangkan platform digital untuk kepentingan internal ataupun eksternal.

Paperless

The Company has implemented paperless office policy initiative aimed at minimizing the use of paper considering the negative impact on the environment due to massive tree felling. To support this policy, the Company urges all employees to always optimize the facilities that have been prepared by the Company and develop digital platforms for internal and external interests.

Pengelolaan Limbah

Salah satu dampak dari kegiatan usaha Perseroan adalah adanya limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional perkantoran. Sebagian besar limbah adalah limbah yang tidak berbahaya. Semua limbah yang dihasilkan diserahkan kepada pihak ketiga seperti aparat pemerintah daerah yang akan mengolah atau membuangnya ke tempat pembuangan akhir.

Waste Management

One of the impacts of the Company's business activities is the presence of waste generated from office and warehouse activities and activities. Most of the waste is non-hazardous solid waste. All waste generated is handed over to third parties who will process it or dispose of it in landfills. The company ensures that the party has a waste management permit related to environmental service standard regulations.

KEANEKARAGAMAN HAYATI

Secara geografis, seluruh areal operasional yang dimiliki Perseroan tidak bersinggungan dengan kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, dalam proses pengembangan setiap usaha, Perseroan memperhatikan risiko terhadap ekosistem lokal.

BIODIVERSITY

Geographically, all operational areas owned by the Company are not intersect with conservation areas with high biodiversity. However, in the process of developing each business, the Company pays attention to risks to the local ecosystem.

PENGADUAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan memberikan kesempatan untuk melakukan pengaduan terkait lingkungan melalui Departemen Building Management. Selama tahun 2022 tidak ada pengaduan atau pelanggaran terkait lingkungan.

BIAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pada saat ini, Perseroan belum mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan lingkungan.

COMPLAINTS RELATED TO THE ENVIRONMENT

The Company provides an opportunity to make complaints related to the environment through the Building Management Department. Throughout 2022 there were no complaints or violations related to the environment.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT COSTS

Currently, the Company has not allocated budget for environmental management.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Corporate Social Responsibility to the Employment, Occupational Health and Safety

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan Perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan terus berupaya untuk mengelola SDM melalui strategi pengembangan yang tepat guna menciptakan SDM yang kompeten, andal, dan berdedikasi tinggi.

Human Resources (HR) is an asset that supports the growth and sustainability of the Company. Therefore, the Company continues to strive to manage human resources through appropriate development strategies to create competent, reliable and highly dedicated human resources.

KETENAGAKERJAAN

Pengelolaan hubungan kerja dinilai menjadi hal yang penting agar dapat memberikan hubungan timbal balik yang positif kepada karyawan. Perseroan memastikan bahwa pengelolaan tenaga kerja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESETARAAN

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan mulai dari proses rekrutmen hingga promosi ke jenjang tertinggi dalam struktur organisasi. Penerapan prinsip non-diskriminasi ini dapat ditunjukkan melalui keragaman komposisi hingga level manajerial.

PROGRAM KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Perseroan memiliki kebijakan untuk memberikan nilai upah minimum kepada pekerja di golongan terendah, yang sama dengan Upah Minimum Provinsi setempat. Perseroan telah menyusun program kesejahteraan karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

EMPLOYMENT

Management of work relations is considered to be important in order to provide a positive reciprocal relationship to employees. The Company ensures that the management of the workforce is in accordance with the prevailing laws and regulations

EQUALITY

The company provides equal opportunities to all employees starting from the recruitment process to promotion to the highest level in the organizational structure. The application of the principle of non-discrimination can be demonstrated through the diversity of composition down to the managerial level.

EMPLOYEE WELFARE PROGRAM

The Company has policy of providing a minimum wage value to workers in the lowest class, which is the same as the local Provincial Minimum Wage. The Company has developed an employee welfare program in accordance with applicable laws and regulations through

yang berlaku melalui remunerasi dan fasilitas atau benefit lainnya seperti tunjangan hari raya, cuti melahirkan, asuransi kesehatan, dan pelayanan kesehatan.

TINGKAT KECELAKAAN KERJA

Menyadari aktivitas operasi Perseroan memiliki karakteristik risiko yang berbeda dengan industri yang lain, maka Perseroan senantiasa menempatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai prioritas utama.

KEGIATAN BIDANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem operasional Perusahaan. Sistem tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, perhatian juga diberikan Perseroan terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan dengan senantiasa memitigasi dampak kegiatan operasional bisnis terhadap karyawan dan kelangsungan usaha. Fasilitas kesehatan yang diberikan kepada karyawan cukup komprehensif yang antara lain mencakup BPJS dan asuransi kesehatan yang ditunjuk Perseroan. Kebijakan kesehatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk memastikan agar kesehatan karyawan tetap prima sehingga membawa dampak positif bagi karyawan selaku individu dan keluarganya, yang pada akhirnya diharapkan akan berdampak pada perbaikan produktivitas Perseroan.

remuneration and other facilities or benefits such as religious holiday allowances, maternity leave, health insurance and health services.

WORK ACCIDENT RATE

Recognizing that the Company's operating activities have risk characteristics that are different from other industries, the Company always places Occupational Health and Safety (K3) as a top priority.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACTIVITIES

In occupational health and safety sector, the Company implements an occupational health and safety management system that is integrated with the Company's operational system. The system is implemented in accordance with the applicable laws and regulations.

In addition, the Company also pays attention to the safety and health of employees by continuously mitigating the impact of business operations on employees and business continuity. The health facilities provided to employees are quite comprehensive which include BPJS and health insurance appointed by the Company. The health policy is intended as an effort to ensure that the health of employees remains prime so as to have a positive impact on employees as individuals and their families, which in the end is expected to have an impact on improving the productivity of the Company.

MEKANISME PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN

Perseroan memberikan akses bagi karyawan untuk dapat mengadukan keluhan, ketidakpuasan, atau keberatan yang dirasakan terkait pelaksanaan tugas atau hal-hal bersifat kepegawaian, melalui mekanisme yang telah ditentukan Perseroan dalam hal pengaduan masalah ketenagakerjaan.

Mekanisme tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

- Setiap keluhan dan pengaduan karyawan yang menyangkut ketenagakerjaan, pertama-tama diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan atasan langsung.
- Bila penyelesaian belum mencapai hasil yang memuaskan, maka karyawan dapat meneruskan keluhan dan pengaduan kepada atasan yang lebih tinggi.
- Dalam hal tidak tercapai kata sepakat antara perusahaan dengan organisasi pekerja maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2022 tidak ada pengaduan masalah ketenagakerjaan yang masuk ke unit Hubungan Industrial.

DAMPAK ATAS KEGIATAN

Pada tahun 2022, pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan K3 secara keseluruhan cukup efektif dalam rangka memenuhi kepentingan karyawan serta selaras dengan tujuan Perusahaan.

EMPLOYMENT ISSUES COMPLAINTS MECHANISM

The Company provides access for employees to be able to report complaints, dissatisfaction, or objections that are felt related to the implementation of duties or matters of an employment nature, through the mechanism determined by the Company in terms of employment issues complaints.

The mechanism is implemented as follows:

- All employee complaints and grievances related to employment, are first resolved by deliberation to reach a consensus with direct superiors.
- If the settlement has not reached satisfactory results, then the employee can forward complaints and complaints to a higher superior.
- In the event that an agreement is not reached between the company and the workers' organization, the settlement shall be carried out in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

Throughout 2022, there were no incoming employment issues complaints to the Industrial Relations unit.

IMPACT ON ACTIVITIES

In 2022, the implementation of the Company's social responsibility activities related to employment and K3 as a whole is quite effective in order to fulfill the interests of employees and synergize with the Company's objectives.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI BIDANG KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility In Community Aspect

Masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk berkontribusi kepada masyarakat guna menciptakan hubungan timbal balik yang positif.

The community is one of the stakeholders that has influence on the continuity of the Company's business. The Company is committed to contributing to society in order to create positive reciprocal relationships.

DAMPAK OPERASI TERHADAP MASYARAKAT

Keberadaan Perseroan di tengah masyarakat di berbagai wilayah operasionalnya telah menghasilkan berbagai dampak positif. Dampak positif tersebut antara lain penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, peningkatan kegiatan ekonomi baik di sektor formal maupun informal yang secara tidak langsung meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

PENGADUAN MASYARAKAT

Untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat, Perseroan memiliki berbagai mekanisme komunikasi, salah satunya Perseroan memiliki wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait dampak bisnis melalui media elektronik dan media lainnya. Mengenai mekanisme dan prosedur pengaduan, detailnya dapat dilihat di bab Whistleblowing System.

IMPACT OF OPERATIONS TO THE COMMUNITY

The existence of the Company in the midst of the community in various operational areas has produced various positive impacts. These positive impacts include creating employment opportunities for the local community, increasing economic activity in both the formal and informal sectors which indirectly improve the standard of living and welfare of the community.

PUBLIC COMPLAINTS

In order to maintain harmonious relations with stakeholders, particularly the community, the Company has various communication mechanisms, one of which is that the Company has a forum for the community to submit complaints regarding business impacts through electronic media and other media. Regarding the complaint mechanism and procedures, details can be found in the Whistleblowing System chapter.

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Perseroan melaksanakan berbagai program yang berorientasi pada kontribusi terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Total biaya yang telah diinvestasikan dalam kegiatan CSR sepanjang tahun 2022 mencapai Rp7.897.200 dengan kegiatan antara lain santunan kepada anak yatim dan perayaan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES

The Company implements various programs which oriented towards contributing to community development and empowerment through corporate social responsibility (CSR) activities. Throughout 2022, the total budget invested in CSR activities reaches Rp7.897.200 with activities including compensation for orphans and celebrations to commemorate the Independence Day of the Republic of Indonesia.



Tanggung Jawab Sosial Keagamaan (Program Ramadhan)
Tanggal 27 April 2022, Santunan dalam bentuk uang diberikan kepada 40 orang anak yatim/piatu dan 5 orang pembimbing, total biaya sebesar Rp 3.175.000.

Social Responsibility in Religious Aspect (Ramadan Program)
April 27, 2022, the cash donation was given to 40 orphans and 5 mentors, the total budget of Rp3,175,000.



Tanggung Jawab Sosial Keagamaan (Program Natal)

Santunan ini dilakukan bekerjasama dengan holding IBFN, yaitu PT Intraco Penta Tbk diberikan untuk memperingati hari raya Natal dengan melakukan kunjungan Tali Kasih Natal ke Panti Asuhan Pondok Kasih Agape, yang letak tidak jauh dari IBP yaitu di Jakarta Utara. Acara dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022, turut dihadiri oleh Direktur Bapak Alexander Reyza & Corporate Secretary Ibu Yunita. Santunan diberikan dalam bentuk makan siang dan uang tunai. Total biaya sebesar Rp3.080.000.

Social Responsibility in Religious Aspect (Christmas Program)

This donation was done in collaboration with the IBFN holding, which is PT Intraco Penta Tbk to celebrate Christmas holiday by visiting Pondok Kasih Agape Orphanage, nearby the IBP, which is located in North Jakarta. The event was held on December 22 2022, also attended by Director Mr. Alexander Reyza & Corporate Secretary Mrs. Yunita. The donation was given in form of lunch and cash. The total budget amounted Rp3,080,000.



Tanggung jawab Sosial dalam rangka memperingat HUT Kemerdekaan RI

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2022 yang merupakan aktivitas Perseroan bersama seluruh karyawan IBP dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI dan juga dihadiri oleh SPV Human Energy PT Intraco Penta Tbk. Jumlah anggaran yang di gunakan untuk program ini adalah sebesar Rp. sebesar Rp 1.642.200,-

Social Responsibility to celebrate Republic of Indonesia Independence Day

This event was held on August 26 2022 as the Company's collaboration with all IBP employees in celebrating Republic of Indonesia Independence Day and was also attended by SPV Human Energy PT Intraco Penta Tbk. The total budget allocated for this event amounted Rp1,642,200,-

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Corporate Social Responsibility Related To Responsibility To The Consumer

Pelanggan adalah pemangku kepentingan yang merasakan dampak langsung terhadap kualitas produk dan layanan yang diberikan. Untuk itu, Perseroan selalu menjaga kepuasan pelanggan melalui kualitas produk dan layanan yang dimiliki dengan mengutamakan spesifikasi terbaik dan aspek keselamatan sesuai standar internasional.

Customers are stakeholders whom directly affected to the quality of the products and services provided. For this reason, the Company always maintains customer satisfaction through the quality of its products and services by prioritizing the best specifications and safety aspects according to international standards.

INOVASI PENGEMBANGAN PRODUK DAN LAYANAN

Perseroan berupaya untuk menyediakan produk dan layanan dengan kualitas terbaik sesuai kebutuhan pelanggan.

SURVEY KEPUASAN PELANGGAN

Hingga tahun 2022 Perseroan belum melakukan survei kepuasan pelanggan. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk melakukan survei kepuasan pelanggan.

MEKANISME PENGADUAN PELANGGAN

Kepada pelanggan/penyewa, Perseroan memberikan kesempatan dan mekanisme untuk mengajukan pengaduan terkait standar kualitas pelayanan yang diberikan. Perseroan telah menyediakan sarana penyampaian pengaduan dan masukan melalui:

PRODUCT AND SERVICE DEVELOPMENT INNOVATION

The Company strives to provide the highest quality products and services according to customer needs.

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

As of 2022, the Company has not conducted a customer satisfaction survey. Going forward, the Company is committed to conduct customer satisfaction survey.

CUSTOMER COMPLAINT MECHANISM

To customers/tenants, the Company provides opportunities and mechanisms to submit complaints regarding the quality standards of services provided. The Company has provided channel to submit complaints and input through:

PT Intan Baru Prana Tbk

INTA Building, Ground Floor

Jl. Raya Cakung Cilincing Km.3,5

Jakarta 14130

Telp.: +6221-4401408; +6221-4408442

Fax.: +6221-4408441

Email: corsec@ibf.co.id (Hubungan Investor)

PT Intan Baru Prana Tbk

INTA Building, Ground Floor

Jl. Raya Cakung Cilincing Km.3,5

Jakarta 14130

Telp.: +6221-4401408; +6221-4408442

Fax.: +6221-4408441

Email: corsec@ibf.co.id (Hubungan Investor)

7

LAPORAN KEUANGAN AUDIT

Audited Financial Report

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu/formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)

LAPORAN KEUANGAN/FINANCIAL STATEMENTS
31 DESEMBER/DECEMBER 2022 DAN/AND 2021

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2022
PT INTAN BARU PRANA TBK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Alexander Reyza
Alamat kantor : Jl. Raya Cakung Cilincing Km 3,5
Jakarta Utara
Alamat rumah : Komp. Hankam Blok G 11 RT/RW
006/006. Kel. Pondok Labu,
Cilandak.
Nomor telepon : (62-21) 440 1408
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan dengan basis akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/ For and on behalf of the Board of Directors
Jakarta, 06 Maret/March 2023



Direktur /Director
Alexander Reyza

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT
REGARDING RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
PT INTAN BARU PRANA TBK
AS OF 31 December 2022**

I, the undersigned :

1. Name : Alexander Reyza
Office address : Jl. Raya Cakung Cilincing Km 3,5
Jakarta Utara
Residential address : Komp. Hankam Blok G 11 RT/RW
006/006. Kel. Pondok Labu,
Cilandak.
Phone number : (62-21) 440 1408
Position : Director

state that :

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements;
2. The financial statements have been prepared and presented on the basis of accounting in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statement;
b. The financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts;
4. We are responsible for the Company's internal control systems.

Thus this statement is made truthfully.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

No.: 00205/2.1133/AU.1/09/1778-2/1/III/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Intan Baru Prana Tbk
(dahulu PT Intan Baruprana Finance Tbk)

The Shareholders, Board of Commissioner and Director
PT Intan Baru Prana Tbk
(formerly PT Intan Baruprana Finance Tbk)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Intan Baru Prana Tbk (dahulu PT Intan Baruprana Finance Tbk) ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Ketidakpastian Material yang Terkait dengan Kelangsungan Usaha

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 32 atas laporan keuangan terlampir, Perusahaan mengalami akumulasi defisit dan defisiensi modal masing-masing sebesar Rp1.427.589.566,552 dan Rp563.343.150.360 pada tanggal 31 Desember 2022. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Intan Baru Prana Tbk (formerly PT Intan Baruprana Finance Tbk) (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the period then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2022, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Material Uncertainty Related to Going Concern

As disclosed in Note 32 to the financial statements, the Company incurred accumulated deficit and capital deficiency amounted to Rp1,427,589,566,552 and Rp563,343,150,360 as of 31 December 2022. These conditions indicate that a material uncertainty exists that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Tel: +62 21 3144003 • Fax: +62 21 3144213 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230
Executive Office : Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267 • Central Jakarta 10340 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan tahun ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penurunan nilai untuk piutang usaha pembiayaan yang belum tertagih

Lihat Catatan 3e mengenai Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting - Instrumen Keuangan.

Pada tanggal 31 Januari 2022, PT Intan Baru Prana Tbk (dahulu PT Intan Baruprana Finance Tbk) mendapat Surat Keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. KEP-8/D.05/2022 berkaitan dengan pencabutan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan. Dengan dicabutnya izin usaha, Perusahaan diwajibkan menghentikan kegiatan usaha sebagai perusahaan pembiayaan yang berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah piutang usaha pembiayaan senilai Rp1.458.951.970.457 telah diprovisikan dengan mengevaluasi penurunan nilai berdasarkan estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali dengan jumlah keseluruhan penurunan nilai sebesar Rp1.096.158.183.353. Saldo piutang usaha pembiayaan bersih setelah dikurangi dengan penurunan nilai sebesar Rp362.793.787.104.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

- Kami memahami dan menilai ketepatan kebijakan akuntansi dan pengungkapan terkait yang diterapkan dalam penurunan nilai atas piutang usaha pembiayaan.
- Kami menilai dan menguji metodologi dan asumsi perhitungan yang digunakan Perusahaan atas penurunan nilai piutang usaha pembiayaan yang meliputi (i) evaluasi model dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan serta (ii) memeriksa keandalan data yang digunakan dalam menyusun perhitungan.
- Kami memeriksa keakuratan data dan perhitungan penurunan nilai atas piutang usaha pembiayaan dengan melakukan penghitungan ulang atas keseluruhan piutang usaha pembiayaan.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakakuratan material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Impairment of uncollected financing trade receivables

Refer to Note 3e regarding Summary of Significant Accounting Policies - Financial Instrument.

As of 31 January 2022, PT Intan Baru Prana Tbk (formerly PT Intan Baruprana Finance Tbk) received the Decision Letter from Financial Services Authority through its letter No. KEP-8/D.05/2022 regarding the revocation of business license as a finance company. With the revocation of the business license, The Company is obliged to stop its business activities as a finance company effective from the date of decision. As of 31 December 2022 financing trade receivables of Rp1,458,951,970,457 has been provisioned by evaluating impairment based on the estimated recoverable amount with total impairment of Rp1,096,158,183,353. The balance of net financing trade receivables after deducting impairment is amounted to Rp362,793,787,104.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- We understood and assessed the appropriateness of the accounting policy and related disclosures applied in the impairment of financing trade receivables.
- We assessed and tested the methodology and calculation assumptions used by the Company for impairment of financing trade receivables which include (i) evaluating the models and methodology used in the calculations and (ii) examining the reliability of the data used in preparing the calculations.
- We examined the accuracy of the data and the calculation of impairment for financing trade receivables by recalculate the whole financing trade receivables.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information, and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Informasi Lain (lanjutan)

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyedikan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian secara pengendalian internal.

Other Information (continued)

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode ini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Marlina, CPA

Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.1778
Izin Usaha/Business License No. 855/KM.1/2017

6 Maret/March 2023



PKF

Ikhtisar Kinerja
Performance Highlights

Laporan Manajemen
Management Report

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber Daya Manusia
Human Resource

Analisis & Pembahasan
Manajemen
Management Discussion & Analysis

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Report

The original financial statements
included herein is in Indonesian language

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	5	33.641.356.257	11.763.130.207	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	6	16.741.231	3.002.430	Restricted cash
Investasi neto sewa pembiayaan	7	179.331.022.155	265.554.014.635	Net investments in finance lease
Tagihan anjak piutang	8	4.077.657.480	4.152.657.637	Factoring receivables
Pembiayaan modal kerja				Working capital financing
Pihak berelasi		31.191.977.368	31.268.036.420	Related parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(2.013.569.840)	(1.013.569.840)	Allowance for impairment losses
Pembiayaan modal kerja-bersih		29.178.407.528	30.254.466.580	Working capital financing-net
Piutang lain-lain		11.634.297	-	Other receivable
Aset tetap		88.867.004	1.929.000.107	Fixed assets
Aset lain-lain	9	154.784.120.962	122.385.503.380	Other assets
Aset pajak tangguhan	26b	120.677.251.263	156.171.581.024	Deferred tax assets
JUMLAH ASET		521.807.058.177	592.213.356.000	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL				LIABILITIES AND CAPITAL DEFICIENCY
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	10	66.995.967.387	68.143.100.565	Trade payables
Utang pajak	11	52.925.328	64.077.516	Taxes payable
Utang kepada pihak berelasi	12	73.778.989	86.059.099	Payables to related parties
Utang bank	13	605.147.200.826	629.758.910.329	Bank loans
Utang kepada lembaga keuangan	14	60.081.594.870	54.585.275.133	Loan from financial institution
Medium term notes	15	299.398.901.926	303.194.040.083	Medium term notes
Liabilitas lain-lain	16	53.399.839.211	58.223.936.621	Other liabilities
Jumlah liabilitas		1.085.150.208.537	1.114.055.399.346	Total liabilities
DEFISIENSI MODAL				CAPITAL DEFICIENCY
Modal dasar				Capital stock
Modal dasar -				Authorized -
Seri A : 1.322.899.281 saham -				Serie A : 1,322,899,281 shares -
Rp500;				Rp500;
Seri B : 1.354.201.438 saham -				Serie B : 1,354,201,348 shares -
Rp250 pada 31 Desember 2022				Rp250 in 31 December 2022
dan 31 Desember 2021				and 31 December 2021
Modal ditempatkan dan disetor -				Issued and paid-up -
Seri A : 1.322.899.281 dan				Serie A : 1,322,899,281 and
Seri B : 194.433.068 dan				Serie B : 194,433,068 and
194.421.968 saham pada				194,421,968 share in
31 Desember 2022 dan				31 December 2022 and
31 Desember 2021	17	710.057.907.500	710.055.132.500	31 December 2021
Tambahan modal disetor	17	131.748.630.912	131.746.133.412	Additional paid-in capital
Modal lain-lain - opsi saham				Other equity - management and
karyawan	29	19.549.654.054	19.549.654.054	employee stock option plan
Penghasilan komprehensif lain		2.890.223.726	2.890.223.726	Other comprehensive income
Akumulasi kerugian				Accumulated losses
Ditentukan penggunaannya		3.082.727.676	3.082.727.676	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		(1.430.672.294.228)	(1.389.165.914.714)	Unappropriated
Jumlah defisiensi modal		(563.343.150.360)	(521.842.043.346)	Total capital deficiency
JUMLAH LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL		521.807.058.177	592.213.356.000	TOTAL LIABILITIES AND CAPITAL DEFICIENCY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements
form an integral part of these financial statements.

The original financial statements
included herein is in Indonesian language

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
Pendapatan				Revenues
Pendapatan sewa pembiayaan	18	14.610.642.635	13.836.695.778	Finance lease income
Pendapatan/(beban) ljarah-bersih	19	1.173.055.021	(2.213.126.089)	ljarah income/(expense)-net
Pendapatan modal kerja		409.900.497	581.475.835	Working capital income
Pendapatan lain-lain	20	16.227.359.279	10.426.225.968	Other income
Jumlah pendapatan		32.420.957.432	22.631.271.492	Total revenues
Beban				Expenses
Beban keuangan	21	(5.731.279.609)	(9.085.694.142)	Finance cost
Bagi hasil	22	(2.729.138.199)	(2.938.000.348)	Profit sharing
Beban umum dan administrasi	23	(12.591.876.829)	(17.496.296.940)	General and administrative expenses
Kerugian penurunan nilai	24	(17.380.712.548)	(133.503.854.754)	Impairment losses
Beban lain-lain	25	-	(11.376.281.816)	Other expense
Jumlah beban		(38.433.007.185)	(174.400.128.000)	Total expenses
Rugi sebelum pajak		(6.012.049.753)	(151.768.856.508)	Loss before tax
Beban pajak	26a	(35.494.329.761)	(49.023.052.377)	Tax expense
Rugi bersih tahun berjalan		(41.506.379.514)	(200.791.908.885)	Net loss for the year
Keuntungan aktuarial - bersih				Actuarial gain - net
setelah pajak tangguhan		-	1.257.956.710	of deferred tax
Jumlah rugi komprehensif				Total comprehensive
 tahun berjalan		(41.506.379.514)	(199.533.952.175)	loss for the year
Rugi per saham	27	1.517.332.349	1.517.321.249	Loss per share
Dasar		(27,35)	(132,33)	Basic

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements
form an integral part of these financial statements.

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in of Rupiah, unless otherwise stated)

PT Intan Baru Prana Tbk 2022 Annual Report

	Modal saham/ Capital stock	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Modal lain-lain - opsi saham/ Other entity - management and employee stock option plan	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Akumulasi kerugian/ accumulated losses		
					Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah/ Total
Saldo 1 Januari 2021	710.055.132.500	131.746.133.412	19.549.654.054	1.632.267.016	3.082.727.676	(1.188.374.005.829)	(322.308.091.171)
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	-	1.257.956.710	-	(200.791.908.885)	(199.533.952.175)
Saldo 31 Desember 2021	710.055.132.500	131.746.133.412	19.549.654.054	2.890.223.726	3.082.727.676	(1.389.165.914.714)	(521.842.043.346)
Rugi bersih tahun berjalan	2.775.000	2.497.500	-	-	-	(41.506.379.514)	(41.501.107.014)
Saldo 31 Desember 2022	710.057.907.500	131.748.630.912	19.549.654.054	2.890.223.726	3.082.727.676	(1.430.672.294.228)	(563.343.150.360)

Net loss for the year

Balance as of 31 December 2021

Net loss for the year

Balance as of 31 December 2022

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements
included herein is in Indonesian language

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	2021	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan:			Cash receipts from customers:
Sewa pembiayaan	60.864.034.534	56.875.676.015	Finance lease
Sewa ljarah	1.608.650.269	901.402.622	Ijarah lease
Pengeluaran kas untuk:			Cash paid for:
Kegiatan sewa pembiayaan, anjak piutang dan modal kerja	(1.139.363.180)	(1.860.364.897)	Leasing, factoring and working capital activities
Pembayaran beban usaha	(12.543.423.972)	(16.198.278.024)	Operating expenses
Pembayaran beban keuangan:			Cash used for financing expenses:
Bagi hasil	(1.870.797.536)	(2.942.270.072)	Profit sharing
Beban bunga dan administrasi bank	(1.671.859.354)	(2.485.951.933)	Interest and other financial charges
Penerimaan kas untuk aktivitas operasi - bersih	45.247.240.761	34.290.213.711	Net cash receipts from operations
Pendapatan bunga diterima	127.268.664	115.418.863	Interest income received
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	45.374.509.425	34.405.632.574	Net cash provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Penjualan agunan yang diambil alih	-	180.000.000	Placement of plan assets
Penjualan aset tetap	-	9.090.909	Sale of foreclosed assets
Perolehan aset tetap	-	(44.000.000)	
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	-	145.090.909	Net cash provided by investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Pembayaran utang bank	(25.127.161.415)	(25.326.917.268)	Payments of bank loans
Pembayaran <i>medium term notes</i>	3.795.138.157	(5.341.747.996)	Payments of medium term notes
Pembayaran utang kepada pihak berelasi	(443.278.778)	(149.277.145)	Payment of payables from related parties
Pembayaran utang kepada lembaga keuangan	(77.745.240)	(140.632.556)	Payment of loan from financial institution
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(21.853.047.276)	(30.958.574.965)	Net cash used for financing activities
Kenaikan bersih kas dan setara kas	23.521.462.149	3.592.148.518	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	11.763.130.207	8.210.838.527	Cash and cash equivalents at beginning of the year
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(1.643.236.099)	(39.856.838)	Effect of foreign exchange rate changes
Kas dan setara kas akhir tahun	33.641.356.257	11.763.130.207	Cash and cash equivalents at end of the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements
included herein is in Indonesian language

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Intan Baru Prana Tbk (dahulu PT Intan Baruprana Finance Tbk) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 19 tanggal 4 September 1991, yang diperbaharui dengan Akta No. 121 tanggal 16 Juni 1993, dari Esther Daniar Iskandar, S.H., notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-6083 HT.01.01.Th.93 tanggal 15 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 12 Oktober 1993, Tambahan No. 4771 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 18 Oktober 1994, Tambahan No. 8058. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 33 tanggal 23 Maret 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Kota Jakarta Timur, mengenai perubahan nama Perusahaan. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-0022860.AH.01.02 tertanggal 30 Maret 2022.

Perusahaan memulai usahanya secara komersial pada tahun 1997. Kantor pusat Perusahaan terletak di Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, Jakarta 14130.

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, sewa operasi, dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan mendapatkan izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 326/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997. Pada Februari 2023, Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait perubahan aktivitas bisnis Perusahaan (Catatan 32).

Pada tahun 2010, Perusahaan mendapatkan izin untuk melakukan transaksi syariah sesuai dengan surat No. U-158/DSN-MUI/V/2010 tanggal 29 Mei 2010 dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Perusahaan mendapatkan izin pembukaan unit usaha syariah tanggal 15 Juni 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-128/NB.223/2015.

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Intan Baru Prana Tbk (formerly PT Intan Baruprana Finance Tbk) (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 19 dated 4 September 1991 and amended by Notarial Deed No. 121 dated 16 June 1993 of Esther Daniar Iskandar, S.H., notary in Jakarta, and approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C2-6083 HT.01.01.Th.93 dated 15 July 1993, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 82 dated 12 October 1993, Supplement No. 4771 and State Gazette of the Republic of Indonesia No. 83 dated 18 October 1994, Supplement No. 8058. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 33 dated 23 March 2022, of Rini Yulianti, SH., notary in East Jakarta, regarding the change of the company name. These changes the amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under letter number No. AHU-0022860.AH.01.02 dated 30 March 2022.

The Company started its commercial operations in 1997. Its head office is located at Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, Jakarta 14130.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is to engage in investment financing, working capital financing, multipurpose financing, operating lease, and/or business activities of other financing under the approval of the Otoritas Jasa Keuangan. The Company obtained a license as a financing institution from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. 326/KMK.017/1997 dated 21 July 1997. In February 2023, the Company has obtained approval from the Shareholder to amend the Articles of Association regarding the Company's business activities (Note 32).

In 2010, the Company obtained its license to undertake sharia transactions according to letter No. U-158/DSN-MUI/V/2010 dated 29 May 2010, from the National Sharia Board Majelis Ulama Indonesia. The Company obtained its license to open a business unit of sharia dated 15 June 2015 in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-128/NB.223/2015.

The original financial statements included herein is in Indonesian language

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Dalam penyajian laporan keuangan Perusahaan, transaksi konvensional dan syariah disajikan secara terpisah.

Pada tahun 2018, Perusahaan telah mengajukan penghentian unit usaha syariah secara sukarela. Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-166/NB.223/2018 tanggal 3 Desember 2018, izin usaha syariah Perusahaan No. KEP-128/NB.223/2015 tanggal 15 Juni 2015, dicabut.

Perusahaan menerima Surat Keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Januari 2022 melalui surat No. KEP-8/D.05/2022 berkaitan dengan pencabutan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan. Dengan dicabutnya izin usaha, Perusahaan diwajibkan menghentikan kegiatan usaha sebagai perusahaan pembiayaan yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jumlah karyawan Perusahaan adalah 12 dan 20 karyawan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Intraco Penta. Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	2022
Komisaris :	Petrus Halim
Direktur Utama :	-
Direktur :	Alexander Reyza
	-
Anggota Komite Audit :	Ivan Agustinus Lingga, SE, Ak
Audit Internal :	-
Sekretaris Perusahaan :	Yunita R. Riyadi

*Efektif mengundurkan diri pada 8 Desember 2021.

b. Penawaran umum efek Perusahaan

Pada tanggal 11 Desember 2014, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan suratnya No. S-528/D.04/2014 untuk melakukan penawaran umum atas 668.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 22 Desember 2014 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and general information (continued)

Hence, in preparing the Company's financial statements, conventional and sharia transactions are disclosed separately.

In 2018, the Company has submitted the termination of the sharia business unit, voluntarily. Based on Decision of Board Member Commissioner of Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-166/NB.223/2018 dated 3 December 2018, the sharia business unit license of the Company No. KEP-128/NB.223/2015 dated 15 June 2015 was revoked.

The Company received a Decision Letter from the Financial Services Authority on 31 January 2022 through its letter No. KEP-8/D.05/2022 regarding the revocation of business license as a financing company. With the revocation of the business license, the Company is obliged to stop its business activities as a financing company effective from the date of decision.

The Company has a total number of 12 and 20 employees as at 31 December 2022 and 31 December 2021, respectively.

The Company is part of the Intraco Penta group of companies. The Company's Commissioner Board, Directors, Audit Committee, Internal Audit and Corporate Secretary as at 31 December 2022 and 31 December 2021 consist of the following:

	2021
Petrus Halim :	Commissioner
Carolina Dina Rusdiana :	President Director
Alexander Reyza :	Directors
Mulyadi* :	
Ivan Agustinus Lingga, SE, Ak :	Audit Committee Members
Raden Yesy Mutiara :	Internal Audit
Alexander Reyza :	Corporate Secretary

*Effectively resigned on 8 December 2021.

b. Public offering of shares of the Company

On 11 December 2014, the Company obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioner of Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") in his letter No. S-528/D.04/2014 for its public offering of 668,000,000 shares. On 22 December 2014, these shares were listed in the Indonesia Stock Exchange.

The original financial statements
included herein is in Indonesian language

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. **UMUM** (lanjutan)

c. **Konversi utang menjadi saham**

Berdasarkan Akta Notaris No. 90 tanggal 21 Juni 2018 dari Humbert Lie SH., SE., Mkn., notaris di Jakarta Utara yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam keputusan No. AHU-AH.01.03-0216475 tanggal 21 Juni 2018 dan berdasarkan Akta No. 44 pada tanggal 15 Agustus 2018, dibuat di hadapan Humbert Lie SH., SE., M.Kn., notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0233003 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0233004, yang keduanya tertanggal 15 Agustus 2018, para pemegang saham memutuskan menyetujui penegasan konversi utang menjadi saham biasa Perusahaan berdasarkan dan untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dihomologasi dengan Nomor Perkara No. 123/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 April 2018 dengan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") berdasarkan POJK 38/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada PT Intraco Penta Tbk dan PT Inta Trading serta kepada 2 (dua) Kreditor Separatis yang menolak, yakni PT Bank MNC Internasional Tbk dan Maybank Syariah, setelah dilakukannya eksekusi jaminan oleh Kreditor Separatis yang menolak tersebut yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 5 Juni 2018 dengan Harga Pelaksanaan PT Intraco Penta Tbk dan PT Inta Trading adalah sebesar Rp515 (lima ratus lima belas Rupiah). Sedangkan Harga Pelaksanaan Kreditor Separatis Yang Menolak ditetapkan 5 (lima) kali dari Harga Pelaksanaan Kreditor PT Intraco Penta Tbk dan PT Inta Trading berdasarkan Putusan Pengadilan.

Berdasarkan surat No. S-03732/BEI.PP2/06-2018 tanggal 29 Juni 2018, Bursa Efek Indonesia telah menyetujui pencatatan saham hasil Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan sebanyak 688.155.281 saham.

1. **GENERAL** (continued)

c. **Debt to equity swap**

Based on Notarial Deed No. 90 dated 21 June 2018 of Humbert Lie SH., SE., Mkn., notary in North Jakarta, and approved by Ministry of Law and Human Rights in accordance with the Act No. AHU-AH.01.03-0216475 dated 21 June 2018, and based on Notarial Deed No. 44 dated 15 August 2018, of Humbert Lie SH., SE., M.Kn., notary in North Jakarta, as notified to the Minister of Law and Human Rights based on the Acceptance Letter for the Notification of Amendment to Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0233003 and Letter of Acceptance of Notification of Amendment to Articles of Association No. AHU-AH. 01.03-0233004, both of dated 15 August 2018, the shareholders agreed to decide approval of debt to equity swap based on and to execute decision of The Commercial Court at the Central North Jakarta District Court has decided the case of Suspension of Debt Payment ("PKPU") No. 123/Pdt.Sus/PKPU/2017/ PN.Niaga.Jkt.Pst., dated 10 April 2018 by doing the Private Placement ("PMTHMETD") based on POJK 38/2014 regarding Private Placement to PT Intraco Penta Tbk and PT Inta Trading and to 2 (two) Rejected Separatist Creditors, PT Bank MNC Internasional Tbk and Maybank Syariah, after the material execution by Rejected Separatist Creditors and has been approved in Extraordinary General Meeting of Stockholders (EMGS) dated 5 June 2018 with execution price PT Intraco Penta Tbk and PT Inta Trading is Rp515 (five hundred and fifteen Rupiah). And for the execution price for Rejected Separatist Creditors is 5 (five) times higher than the execution price of Creditors PT Intraco Penta Tbk and PT Inta Trading based on Court Decision.

Based on its letter No. S-03732/BEI.PP2/06-2018 dated 29 June 2018, the Indonesia Stock Exchange has approved the listing of shares of Private Placement of the Company of 688,155,281 shares.

The original financial statements included herein is in Indonesian language

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. **UMUM** (lanjutan)

c. **Konversi utang menjadi saham** (lanjutan)

Keterangan efek yang dicatatkan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham/ <i>Shares amount</i>	:
Nilai nominal saham/ <i>Nominal value of share</i>	:
Harga pelaksanaan/ <i>Exercise price</i>	:
Asal saham/ <i>Share origin</i>	:
Tanggal pencatatan/ <i>Listing date</i>	:

d. **Penggabungan saham**

Berdasarkan Akta No. 44 tanggal 15 Agustus 2018, dibuat di hadapan Humbert Lie SH., SE., M.Kn., notaris di Jakarta Utara yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam keputusan No. AHU-0107288.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018, menyetujui untuk melaksanakan Penggabungan Nilai Nominal Saham (*Reverse Stock*) dengan cara melakukan pengurangan saham terhadap seluruh saham-saham dari Perusahaan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dimana setiap 5 (lima) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham akan mengalami perubahan menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, seluruh saham Perusahaan masing-masing sejumlah 1.517.332.349 dan 1.517.321.249 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

2. **PERUBAHAN ATAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK")**

Standar akuntansi revisi berikut yang relevan untuk Perusahaan, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan:

- Amendemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis"
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi"
- Penyesuaian Tahunan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian Tahunan PSAK 73 "Sewa"

1. **GENERAL** (continued)

c. **Debt to equity swap**

The description of listed securities is as follows:

688.155.281 saham/shares	:
Rp500 per saham/per share	:
Rp515 per saham/per share	:
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/ <i>Private Placement</i>	:
11 Juli/July 2018	:

d. **Reverse stock**

Based on Notarial Deed No. 44 dated 15 August 2018, of Humbert Lie SH., SE., M.Kn., notary in North Jakarta, and approved by Ministry of Law and Human Rights of Republic Indonesia in accordance with the Act No. AHU-0107288.AH.01.11 Year 2018 dated 15 August 2018, agreed to conduct the Reverse Stock Incorporation by reducing the shares of the issued and fully paid shares in which every 5 (five) shares with par value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share will be split into 1 (one) share with nominal value of Rp500 (five hundred Rupiah) per share.

As of 31 December 2022 and 2021, all of the Company's 1,517,332,349 and 1,517,321,249 outstanding shares have been listed in the Indonesia Stock Exchange.

2. **CHANGES TO THE STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")**

The following revised accounting standards which are relevant to the Company, are effective from 1 January 2022 and do not result in significant impact to the Company's financial statements:

- Amendment to PSAK 22 "Business Combinations"
- Amendment to PSAK 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets"
- Annual Improvement of PSAK 71 "Financial Instruments"
- Annual Improvement of PSAK 73 "Leases"

*The original financial statements
included herein is in Indonesian language*

**PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT INTAN BARU PRANA Tbk
(formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. PERUBAHAN ATAS PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") (lanjutan)**

Standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan relevan untuk Perusahaan, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap"
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Perusahaan sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut, terhadap laporan keuangan Perusahaan.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING**

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang terdiri dari PSAK (termasuk prinsip akuntansi syariah) yang dikeluarkan oleh DSAK dan DSAS dari IAI serta Peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian & Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang terdapat dalam salinan keputusan ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012. Laporan keuangan ini tidak dimaksudkan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil operasi dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan praktik pelaporan yang berlaku umum di negara dan yurisdiksi lain.

b. Dasar penyajian

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

**2. CHANGES TO THE STATEMENTS OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") (continued)**

The following revised accounting standards issued and relevant to the Company, are effective from 1 January 2023 and have not been early adopted by the Company:

- *Amendment to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements"*
- *Amendment to PSAK 16 "Fixed Assets"*
- *Amendment to PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"*
- *Amendment to PSAK 46 "Income Taxes"*

As at the authorization date of these financial statements, the Company is assessing the implication of the above standards, to the Company's financial statements.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES**

a. Statement of compliance

The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which consists of PSAK (including sharia accounting principles) issued by DSAK and DSAS from IAI and BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 date 25 June 2012 regulations related to presentation of financial statements of public company. These financial statements are not intended to present the financial position, result of operating and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions.

b. Basis of presentation

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is the functional currency of the Company.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

The original financial statements included herein is in Indonesian language

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Dasar penyajian (lanjutan)

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain.

Dalam mengestimasi nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas, jika pelaku pasar memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan dalam laporan keuangan ditentukan berdasarkan basis tersebut, kecuali untuk transaksi pembayaran berbasis saham dalam ruang lingkup PSAK 53, transaksi sewa dalam ruang lingkup PSAK 73, dan pengukuran yang memiliki beberapa kemiripan dengan nilai wajar tetapi bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi neto dalam PSAK 14 dan nilai pakai dalam PSAK 48.

Selain itu, untuk tujuan pelaporan keuangan, pengukuran nilai wajar dikategorikan ke Level 1, 2 atau 3 berdasarkan tingkat input untuk pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi dan signifikansi input pada pengukuran nilai wajar secara keseluruhan, yang digambarkan sebagai berikut:

- Input Level 1 adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;
- Input Level 2 adalah input, selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- Input Level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Basis of presentation (continued)

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique.

In estimating the fair value of an asset or a liability, the Company takes into account the characteristics of the asset or a liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these financial statements is determined on such a basis, except for share-based payment transactions that are within the scope of PSAK 53, leasing transactions that are within the scope of PSAK 73, and measurements that have some similarities to fair value but are not fair value such as net realizable value in PSAK 14 or value in use in PSAK 48.

In addition, for financial reporting purposes, fair value measurements are categorized into Level 1, 2 or 3 based on the degree to which the inputs to the fair value measurements are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety, which are described as follows:

- Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;
- Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, which are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and
- Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The original financial statements
included herein is in Indonesian language

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Transaksi dan penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing

Dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional Perusahaan (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan.

Pos nonmoneter diukur dalam biaya historis dalam valuta asing yang tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

d. Transaksi pihak-pihak berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Foreign currency transactions and translation

In preparing the financial statements of the Company, transactions in currencies other than the Company's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined.

Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise.

d. Transactions with related parties

A related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:

- i. *Has control or joint control over the reporting entity;*
- ii. *Has significant influence over the reporting entity; or*
- iii. *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

- i. *The entity, and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
- ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member);*

The original financial statements included herein is in Indonesian language

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Transaksi pihak-pihak berelasi (lanjutan)

- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

e. Instrumen keuangan

Aset keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori:

- i. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain;
- ii. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transactions with related parties (continued)

- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies: (continued)
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
 - viii. The entity, or any member of a Company of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

e. Financial instruments

Financial assets

The Company classifies its financial assets in the following categories:

- i. Financial assets at fair value through statements of profit or loss or other comprehensive income;
- ii. Financial assets at amortised cost.

The original financial statements
included herein is in Indonesian language

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, investasi neto sewa pembiayaan, tagihan anjak piutang, pembiayaan modal kerja, dan aset lain-lain. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Perusahaan telah melakukan pemilihan tak terbatalan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari aset keuangan yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya.

Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas kredit ekspektasian.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

The Company financial assets include cash and cash equivalent, restricted cash, net investments in finance lease, factoring receivables, working capital financing, and other assets. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Company has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income

Financial assets at amortised cost

Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. A gain or loss on the financial assets that are subsequently measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired.

Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.

Impairment of financial assets

At each reporting date, the Company assess whether the credit risk on a financial instrument has increase significantly since initial recognition.

When making the assessment, the Company use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

The original financial statements included herein is in Indonesian language

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- i. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- ii. Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Perusahaan memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang kepada pihak berelasi, utang bank, utang kepada lembaga keuangan, *medium term notes* dan liabilitas lain-lain. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Impairment of financial assets (continued)

To make that assessment, the Company compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Financial liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK 71 are classifies as follows:

- i. Financial liabilities at amortized cost;
- ii. Financial liabilities at fair value through profit and loss (FVTPL) or other comprehensive income (FVOCI).

The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

The Company has financial liabilities classified into the financial liabilities measured at amortised cost. All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in the profit or loss.

Financial liabilities measured at amortised, trade payables, payables to related parties, bank loans, loan from financial institution, medium term notes and other liabilities. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

The original financial statements
included herein is in Indonesian language

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Pemberhentian pengakuan atas liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

f. Kas dan setara kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank serta semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Investasi neto sewa pembiayaan

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai Lessor

Dalam investasi neto sewa pembiayaan, aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah investasi neto sewa pembiayaan Perusahaan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Derecognition of financial liabilities

Financial liabilities are derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognised in the statements of profit or loss.

Offsetting financial instrument

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparties.

f. Cash and cash equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

g. Net investments in finance lease

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of the ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

As Lessor

Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the amount of the Company's net investment in finance lease.

The original financial statements included herein is in Indonesian language

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Investasi neto sewa pembiayaan (lanjutan)

Sebagai Lessor (lanjutan)

Investasi neto sewa pembiayaan terdiri dari jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai residu yang dijamin (harga opsi) yang akan diterima pada akhir masa sewa, dikurangi dengan penghasilan pembiayaan tangguhan (*unearned lease income*), simpanan jaminan (*security deposit*) dan penyisihan penurunan nilai.

Selisih antara piutang sewa pembiayaan ditambah nilai residu yang dijamin dengan biaya perolehan aset sewaan dicatat sebagai penghasilan pembiayaan tangguhan dan dialokasikan sebagai pendapatan selama masa sewa berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala yang tetap dari investasi neto sewa pembiayaan.

Perusahaan tidak mengakui pendapatan bunga dari piutang sewa pembiayaan yang telah menunggu pembayaran lebih dari 90 hari. Pendapatan tersebut diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima.

Pada saat perjanjian sewa pembiayaan ditandatangani, apabila aset sewaan memiliki nilai residu pada akhir periode sewa, lessee diwajibkan untuk memberikan simpanan jaminan yang akan diperhitungkan dengan nilai jual aset sewaan pada akhir masa sewa, bila hak opsi dilaksanakan oleh lessee. Apabila hak opsi tidak dilaksanakan, simpanan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada lessee pada akhir masa sewa.

Apabila aset sewaan dijual kepada lessee sebelum masa sewa berakhir, maka perbedaan antara harga jual dengan investasi neto sewa pembiayaan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian pada saat terjadinya.

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Investasi neto sewa pembiayaan dinyatakan tidak tertagih dan akan dilakukan penghapusan apabila pembiayaan tersebut telah masuk dalam kategori macet yaitu umur piutang telah jatuh tempo lebih dari 180 hari dan segala upaya penagihan sudah dilakukan oleh Perusahaan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Net investments in finance lease (continued)

As Lessor (continued)

Net investments in finance lease consist of the total lease receivables plus the guaranteed residual value (option price) to be received at the end of the lease period, less unearned lease income, security deposits and allowance for impairment losses.

The difference between the finance lease receivables plus the guaranteed residual value and the acquisition cost of the leased assets is recorded as unearned lease income. This is recognized as finance lease income over the lease period at a periodic rate of return on the net investments in finance lease.

The Company does not recognize interest income from finance lease receivables which are overdue for more than 90 days. Such interest income is recognized as income when already received.

At the inception of the lease, if the leased asset has residual value at the end of the lease period, the lessee is required to make a security deposit which will be applied as payment to the purchase option price of the leased asset at the end of the lease period if the option to purchase is exercised by the lessee. Otherwise, the security deposit will be returned to the lessee at the end of the lease period.

If the leased assets are sold to the lessee before the end of the lease period, the difference between the sales price and the net investments in finance lease is recorded as gain or loss at the time of sale.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the term of the relevant lease.

Net investments in finance lease is considered not collectible and is impaired if the receivable has been categorized as default when the age of the receivable has been past due for more than 180 days and all the efforts to collect debts has been done by the Company.

The original financial statements
included herein is in Indonesian language

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Investasi neto sewa pembiayaan (lanjutan)

Sebagai Lessor (lanjutan)

Investasi neto sewa pembiayaan direstrukturisasi apabila umur pembiayaan telah jatuh tempo melebihi 60 hari dan Perusahaan menilai lessee masih mempunyai kemampuan membayar serta memiliki kelangsungan usaha yang masih berjalan. Selain itu, jika terdapat hukum atau peraturan yang dapat berdampak langsung terhadap bisnis usaha lessee, maka investasi neto sewa pembiayaan juga dapat direstrukturisasi.

h. Tagihan anjak piutang

Tagihan anjak piutang merupakan piutang yang dibeli dari perusahaan lain. Tagihan anjak piutang diklasifikasikan dalam pinjaman yang diberikan dan piutang.

Tagihan anjak piutang dinyatakan sebesar nilai tercatat dikurangi dengan kerugian penurunan nilai. Nilai tercatat tagihan anjak piutang dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi pendapatan yang belum diakui yang diamortisasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif. Pada saat pengakuan awal, nilai wajar tagihan anjak piutang adalah sebesar tagihan anjak piutang dikurangi dengan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada piutang seperti pendapatan tagihan anjak piutang yang belum diakui.

i. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/ Years</u>	<u>Persentase/ Percentage</u>
Kendaraan	5	20%
Peralatan kantor	5	20%
Perabot kantor	5	20%

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Net investments in finance lease (continued)

As Lessor (continued)

Net investments in finance lease is restructured if the receivable has been past due for more than 60 days and the Company assesses the lessee is still capable to repay and have a business that is going concern. Also, if there is a law or regulation that directly affects the lessee's business, the net investments in finance lease can be restructured.

h. Factoring receivables

Factoring receivables are purchased receivables from other companies. These are classified as loans and receivables.

Factoring receivables are stated at carrying amount net of impairment losses. Carrying amounts of factoring receivables are stated at its nominal amount less unearned income which is amortized using the effective interest rate. At initial recognition, the fair value of factoring receivables is equal to the receivables less income directly attributable to the receivables such as unrecognized income on factoring receivables.

i. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

j. Fixed assets

Fixed assets held for use in the supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Vehicles
Office equipments
Office furniture

The original financial statements included herein is in Indonesian language

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INTAN BARU PRANA Tbk
(formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Tagihan anjak piutang (lanjutan)

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi.

k. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset dan liabilitas keuangan dijelaskan dalam Catatan 3e.

l. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan pembiayaan konsumen, pendapatan anjak piutang, pendapatan bunga dan beban bunga diakui secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Factoring receivables (continued)

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of fixed assets, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

k. Impairment of non-financial asset

At the end of each reporting period, the Company reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

Accounting policy for impairment of financial assets and liabilities is discussed in Note 3e.

l. Revenue and expense recognition

Finance lease income, consumer financing income, factoring income, interest income and interest expenses are recognized on an accrual basis using the effective interest method.

*The original financial statements
included herein is in Indonesian language*

**PT INTAN BARU PRANA Tbk
(dahulu PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT INTAN BARU PRANA Tbk
(formerly PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

l. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan ljarah diakui selama masa akad. Pendapatan ljarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban penyusutan aset ljarah.

Beban diakui pada saat terjadinya.

m. Sewa

Sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Perusahaan harus menilai apakah Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:

1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepisi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Revenue and expense recognition (continued)

Revenue from ljarah is recognized over the contract term. Revenue from ljarah is presented net of depreciation expense of assets for ljarah.

Expenses are recognized when incurred.

m. Leases

As lessee

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assesses whether the Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined and:

1. *The Company has the right to operate the asset;*
2. *The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.*

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Company recognizes a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.